

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Sistem hubungan internasional di zaman yang sudah modern saat ini mengutamakan diplomasi dalam hubungan antar negara. Menurut G.R Berridge (2010), konsep diplomasi sendiri merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum (Berridge, 2010). Dalam hal ini, diplomasi berupaya untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain. Sehingga, menurut Sumaryo Suryokusumo, diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya (Suryokusumo, 2005).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diplomasi telah menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan oleh suatu negara untuk meningkatkan hubungan dengan negara lain dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam hubungan internasional, pada umumnya diplomasi merupakan tahap awal yang dilakukan apabila suatu negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi hubungan yang semakin erat. Salah satu bentuk diplomasi yang saat ini sering digunakan oleh beberapa negara di dunia adalah diplomasi publik. Diplomasi publik sendiri dimaknai sebagai suatu proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya,

kepentingan nasional, dan kebijakan -kebijakan yang diambil oleh negaranya (Gouveia, 2006).

Oleh karena itu, diplomasi publik merupakan salah satu instrument dari *soft power diplomacy*. Menurut Joseph Nye, *soft power diplomacy* merupakan cara suatu negara untuk mencapai kepentingan negaranya dengan cara mempengaruhi negara lain tanpa menggunakan unsur ancaman dan paksaan. Diplomasi publik dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan dan kepentingan suatu negara karena dilakukan dengan cara damai, sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi negara lain serta dapat menjaga perdamaian kedua negara.

Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif meningkatkan hubungan diplomatik di negara lain, salah satunya dengan Korea Selatan. Pada tanggal 18 September 1973, Indonesia dan Korea Selatan saling menyetujui hubungan kenegaraan tingkat diplomatik sehingga hal ini menjadi awal dari hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Dengan persetujuan tersebut, maka konsulat jenderal kedua negara berubah menjadi kedutaan Besar Republik Korea (KBRK) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Sejak itu, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan terus mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan dan juga kebudayaan (Dammen, 2009).

Di bidang kebudayaan, Indonesia dan Korea Selatan telah memulai kerjasama sejak ditandatanganinya Persetujuan Kerjasama Kebudayaan pada tahun 2000 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Bagi Korea Selatan, diplomasi kebudayaan telah menjadi salah satu kekuatan politik dipengaruhi oleh adat-istiadat dan kebiasaan, budaya, nilai-nilai, moral, ide, gagasan, maupun pengaruh sosial dan lingkungan. Diplomasi budaya oleh Korea Selatan yang dikenal dengan sebutan *Hallyu* atau *Korean Wave* ini

bertujuan untuk menyebarkan budaya serta memperluas pasarnya di Indonesia. Sama halnya dengan Korea Selatan, Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan diplomasi publik melalui kerjasama kebudayaan dengan Korea Selatan.

Kerjasama kebudayaan antara Indonesia dengan Korea Selatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan industri ekonomi kreatif di kedua negara. Kerjasama ini merupakan salah satu implementasi dari *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*. IK-CEPA merupakan kesepakatan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan yang dapat membuka peluang peningkatan kerjasama industry ekonomi kreatif antara kedua negara (IDN Financials, 2019).

Dalam perkembangan kerjasama di bidang industri kreatif, lembaga Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan, Olah Raga, dan Pariwisata Korea Selatan mulai melakukan kerjasama guna mengembangkan industri kreatif sejak tahun 2013. Seperti yang kita ketahui, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang menggunakan industri kreatif sebagai politik luar negerinya yang diwujudkan melalui budaya *Korean Wave* atau *Hallyu*. Indonesia sendiri bisa dibilang merupakan salah satu negara yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri kreatif.

Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam industri kreatif antara lain dengan melakukan pertukaran, pendidikan, dan pelatihan di bidang teknologi dan produksi, saling bertukar informasi mengenai pembuatan kebijakan, serta memberikan bantuan dan fasilitas untuk mengembangkan industri kreatif. Hal-hal tersebut merupakan upaya untuk membangun hubungan yang kuat antar industri kreatif di masing-masing negara. Bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan pun diterapkan dalam

berbagai bidang industri kreatif seperti seni kebudayaan, konten penyiaran televisi, *fashion* atau mode, , budaya kuliner, serta bidang perfilman. Sebagai tanda dimulainya kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan di bidang industri kreatif, maka kedua negara menandatangani kesepakatan Pembaharuan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 16 Mei 2016 (Afriantari & Putri, 2018).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang telah dipaparkan di awal penelitian ini, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut: ***“Bagaimana kepentingan nasional Indonesia di bidang industri kreatif dalam upaya diplomasi publik di Korea Selatan?”***

## 1.3 Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penulisan serta pemilihan konsep dalam penyusunan hipotesa yang nantinya akan digunakan untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan di atas. Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut :

### 1) Diplomasi Publik

Definisi dari diplomasi publik adalah sebuah upaya suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional melalui dengan menumbuhkan pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi masyarakat di negara lain (*understanding, informing, and influencing foreign audiences*). Dengan kata lain, jika proses diplomasi secara tradisional dikembangkan melalui *mekanisme government to government relations* (pemerintah ke pemerintah), maka proses diplomasi publik lebih ditekankan pada *government to people* (pemerintah ke masyarakat) atau bahkan *people to people relations*

(masyarakat ke masyarakat). Tujuannya, agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas.

Menurut Jay Wang (2006), diplomasi publik merupakan suatu usaha untuk meningkatkan komunikasi antara negara dengan masyarakat. Dengan begitu, maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan politik, ekonomi, maupun sosial (Wang, 2006). Sementara itu, Jan Mellisen (2006) mendefinisikan diplomasi publik sebagai suatu usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara (Mellisen, 2006). Berdasarkan kedua definisi itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik memiliki fungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional di negara lain.

Diplomasi publik memiliki dimensi-dimensi dalam pelaksanaannya. Menurut Gyorgy Szondi terdapat empat dimensi dalam diplomasi publik. Dimensi-dimensi tersebut adalah :

- 1) Dimensi pertama adalah terdapat ketegangan dalam kondisi berhubungan komunikasi dengan negara
- 2) Dimensi kedua adalah terjadinya peningkatan komunikasi dari yang semula hanya satu arah (*persuasif*) menjadi dua arah (*relationship building*)
- 3) Dimensi ketiga adalah kemampuan (*power*) dalam mempengaruhi hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, konsep soft power menjadi salah satu konsep dasar dalam pelaksanaan diplomasi publik

- 4) Dimensi keempat adalah hasil dari tindakan yang akan mempengaruhi pelaksanaan diplomasi dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Proses diplomasi publik tidak hanya terjadi di luar negeri, namun juga dapat terjadi di dalam negeri. Maka dari itu, pelaksanaan diplomasi publik tidak hanya berkaitan dengan kebijakan luar negeri namun juga harus melalui kendala dari dalam negeri. Esensi dari diplomasi publik adalah untuk membuat orang lain berada di pihak sama dengan pelaku diplomasi, sedangkan permasalahan dalam diplomasi publik adalah bagaimana mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud orang bukan hanya pemangku kebijakan, tetapi juga khalayak atau publik. (Potter, 2006).

## 2) Kepentingan Nasional

Hubungan Internasional merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional. Suatu negara akan menjalin hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional inilah yang menjadi suatu tujuan fundamental dan faktor penentu yang akan mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, kepentingan nasional suatu negara dapat berbeda atau bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain (Perwita & Yani, 2005).

Menurut Hans J. Morgenthau, konsep kepentingan nasional terdiri dari tiga jenis. Pertama yakni perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya. Kedua adalah perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya. Terakhir adalah perlindungan terhadap kultur, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya. Maka dari itu, kepentingan nasional dapat

diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi suatu bangsa di suatu negara (Perwita & Yani, 2005).

Dalam kepentingan nasional, terdapat dua perbedaan mendasar yakni kepentingan nasional yang bersifat vital (esensial) dan kepentingan nasional yang bersifat non-vital (sekunder). Kepentingan nasional bersifat vital merupakan kepentingan yang digunakan pada saat suatu negara mengalami keadaan darurat sehingga harus segera diputuskan. Sementara itu, kepentingan nasional bersifat non-vital merupakan kepentingan yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasil dan fungsinya dapat dirasakan dalam jangka panjang (Jemadu, 2008).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini adalah keamanan (*security*) yang mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya, serta kesejahteraan (*prosperity*). Kedua tujuan inilah yang menjadi dasar bagi pembuat keputusan untuk merumuskan dan menetapkan kepentingan nasional (Rudy, 2002).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yakni kapabilitas atau kemampuan suatu negara dalam memperoleh kekuasaan. Kemampuan suatu negara, baik kemampuan dalam menjalin hubungan domestik maupun kemampuannya dalam menjalin hubungan dengan negara lain akan membentuk sebuah kekuasaan. Kekuasaan atau *power* ini akan memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Akan tetapi, kemampuan untuk memperoleh kekuasaan ini perlu disertai oleh adanya interaksi antar negara.

Kapabilitas negara dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasional. Ketahanan nasional merupakan ketahanan negara secara menyeluruh yang mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (Rudy, 2002). Sementara untuk kekuatan nasional (*power*), Semakin besar kekuatan suatu negara maka kapabilitas negara tersebut akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Jadi baik secara internal maupun eksternal kekuatan nasional akan melahirkan kapabilitas bagi negara.

#### 1.4 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dan disertai dengan kerangka konseptual yang ada, didapatkan anggapan dasar atau hipotesa sebagai berikut :

- 1) Perkembangan diplomasi publik Indonesia di Korea Selatan dilatarbelakangi oleh kepentingan Indonesia di bidang industri kreatif
- 2) Faktor yang mendasari Indonesia dalam upaya diplomasi publik di Korea Selatan adalah untuk meningkatkan industri ekonomi kreatif Indonesia.

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui perkembangan hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan

- 2) Mengetahui upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia di Korea Selatan
- 3) Mengetahui kepentingan nasional Indonesia yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan diplomasi publik di Korea Selatan.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

- a) Secara teoritis, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan akan mampu digunakan untuk pengembangan keilmuan mengenai diplomasi, khususnya mata kuliah Diplomasi Kebudayaan.
- b) Secara praktis, hasil kajian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat umum, peneliti, akademisi, dan pemerintah, sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain, khususnya Korea Selatan, yang saat ini sedang menjadi perhatian.

#### 1.7 Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Adapun penulisan skripsi ini memiliki jangka waktu dari tahun 2016-2021, sejak Indonesia dan Korea Selatan menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang industri ekonomi kreatif.

## 1.8 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk memberikan paparan secara menyeluruh mengenai upaya diplomasi publik Indonesia ke Korea Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang dilakukan guna mengungkapkan suatu fenomena yang terjadi di suatu negara dengan data-data yang diperoleh.

Untuk itu, penulis melengkapi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara menghimpun data-data sekunder yang dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dan literatur-literatur yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, data-data dari media cetak maupun elektronik, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penulisan

## 1.9 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dimana masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yang saling berhubungan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi ulasan pemahaman yang menerangkan penjelasan-penjelasan mengenai subjek-subjek penelitian yang dibagi dalam beberapa sub-bab yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II : DINAMIKA PERKEMBANGAN DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA DAN KOREA SELATAN DI BIDANG INDUSTRI KREATIF**

Bab ini berisi tentang hubungan diplomasi publik Indonesia dan Korea di bidang industri kreatif, dimulai dari latar belakang kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang industri kreatif sampai kepada perkembangan diplomasi publik Indonesia dan Korea Selatan di bidang industri kreatif.

## **Bab III : KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM UPAYA DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA KE KOREA SELATAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kepentingan nasional dalam upaya diplomasi publik Indonesia di Korea Selatan. Bab ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi kepentingan nasional Indonesia dalam upaya diplomasi publik yang dilakukan di Korea Selatan.

## **Bab IV : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini berisi daftar referensi dan kepustakaan yang digunakan sebagai penunjang penyusunan skripsi ini.